

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Di tahun 2016 ini, sesuai dengan visi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang berkualitas” pemerintah mengeluarkan arah kebijakan fiskal, dimana tujuannya adalah memperkuat fundamental dan pembangunan ekonomi. Hal tersebut dilaksanakan dengan melakukan strategi-strategi fiskal antara lain, memperkuat stimulus yang meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing, meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program prioritas serta mengendalikan resiko dan menjaga kesinambungan fiskal.

Tujuan dari pembangunan infrastruktur ini adalah untuk mengurangi kesenjangan di masyarakat, selain itu juga sebagai stimulus bagi pengembangan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Bentuk-bentuk infrastruktur yang dibangun mulai dari infrastruktur konektivitas, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pengurangan kesenjangan serta pertahanan, jumlah alokasi anggaran untuk infrastruktur sebesar 15% dari APBN (313,5T). Selain itu masih ada alokasi anggaran yang sifatnya mandatori seperti dana pendidikan sebesar 20 persen (424,8T) dan dana kesehatan 5 persen (106,1T) dari total anggaran.

Apabila kita melihat komposisi APBN seperti yang dijelaskan di atas, dengan prioritas kepada pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur maka akan ada efisiensi anggaran yang berdampak pada belanja di kementerian/lembaga. Dengan kebijakan seperti itu saja, apabila melihat dari struktur APBN saat ini dari anggaran penerimaan sebesar 1.822,5 triliun rupiah dan anggaran belanja sebesar 2.095,7 triliun

rupiah, masih terdapat selisih yang akan ditutup dengan utang. Dan dengan jumlah utang pemerintah yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, bahkan pada tahun 2015, posisi utang Indonesia mencapai 3.098,64 triliun rupiah. Jumlah yang sangat besar apabila dibandingkan dengan anggaran penerimaan kita.

Melihat kondisi seperti itu, kementerian/lembaga harus jeli untuk memanfaatkan anggaran yang tersedia dan sebisa mungkin tidak menambah beban APBN terutama untuk kegiatan operasional yang bukan prioritas. Pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga harus bisa melakukan langkah yang tepat dalam penggunaan anggaran sehingga efektif and efisien dan mendukung visi APBN tahun anggaran 2016.

Selanjutnya, pemerintah dituntut untuk bersikap bijak dalam hal pemenuhan kebutuhan operasional dengan anggaran yang dibatasi. Salah satunya dengan menerapkan prinsip dasar ekonomis. Prinsip dasar ekonomi adalah mendapatkan keuntungan/manfaat yang semaksimal mungkin dengan pengeluaran seminimal mungkin. Prinsip ini dijalankan pemerintah secara berkelanjutan agar pemerintah dapat terus melaksanakan fungsi organisasinya tanpa harus membebani anggaran lebih berat lagi. Salah satu upaya pemerintah agar dapat mencapai tujuan tersebut dengan membuat keputusan serta kebijakan yang tepat dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Pemerintah harus bisa memilah alternatif pemenuhan kebutuhan operasional sehingga tidak mengganggu kegiatan operasi namun juga harus mendukung kebijakan APBN.

Salah satu alternatif adalah melakukan sewa atas kebutuhan operasional, dari kendaraan dinas, komputer, dan peralatan yang lain. Kebijakan ini saat ini diterapkan di beberapa sektor privat dan BUMN di dalam negeri, selain itu ada negara yang menerapkan kebijakan ini, yaitu Australia dan New Zealand.

Dari kebutuhan operasional kantor, belanja yang paling banyak menyerap alokasi anggaran adalah belanja kendaraan operasional. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan menganalisa keputusan pemilihan alternatif pada pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dengan pertimbangan perbandingan antara manfaat dan biaya. *Present Value* (PV) digunakan menganalisis aspek finansial yang berkaitan dengan total biaya operasional kendaraan. Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) digunakan untuk menganalisis nilai manfaat yang

diukur dari aspek non finansial sesuai dengan kriteria manfaat yang diharapkan pemerintah, serta *Benefit Cost Ratio* (BCR) digunakan untuk memberikan analisis komparasi akhir alternatif keputusan yang paling layak diambil. Dengan adanya analisis kelayakan ekonomi dengan pertimbangan perbandingan antara manfaat dan biaya ini diharapkan pemerintah dapat terbantu untuk menentukan keputusan yang paling layak diambil.

Dari observasi awal penulis pada Kementerian Keuangan, pada tahun anggaran 2016, Kementerian Keuangan merencanakan pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional. Dalam alokasi anggaran oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal merencanakan pemenuhan kebutuhan sewa kendaraan dinas operasional bagi pejabat eselon I dan eselon II.

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian tertarik untuk membuat penelitian mengenai penerapan perhitungan kelayakan ekonomis terhadap kendaraan dinas operasional jabatan roda 4 (empat) di lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2016 dengan judul penelitian adalah **“ANALISIS KELAYAKAN EKONOMI DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN KENDARAAN DINAS JABATAN RODA 4 (EMPAT) ANTARA MEKANISME BELI DAN SEWA”**.

B. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini hanya terbatas pada kendaraan dinas operasional jabatan roda 4 (empat) bagi pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Jenderal, sedangkan kendaraan dinas jabatan roda 2 (dua), kendaraan dinas operasional, mobil *ambulance*, mobil jemputan dan kendaraan lain dikecualikan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini akan membandingkan *benefit and cost* ditinjau dari aspek finansial yaitu melalui perhitungan *total cost ownership* dan non finansial dari pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional jabatan roda 4 (empat). Dalam pengembangan penelitian akan dilakukan *benchmarking* atas pelaksanaan kebijakan *total cost ownership* di negara Australia/New Zealand. melalui analisis atas faktor finansial dan faktor lain-lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan atas pemilihan kebijakan yang akan diterapkan.

C. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas, pertanyaan yang akan dijawab dalam skripsi ini, antara lain:

1. Berapakah biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing mekanisme pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat)?
2. Berapakah manfaat yang diterima untuk masing-masing mekanisme pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat)?
3. Berapakah *benefit and cost ratio* untuk masing-masing mekanisme pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat)?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing mekanisme pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat).
2. Mengetahui manfaat yang diterima untuk masing-masing mekanisme pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat).
3. Mengetahui perbandingan *benefit and cost ratio* dari masing-masing mekanisme pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat).

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi masukan kepada Biro Perlengkapan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam membuat kebijakan yang efektif dan efisien dalam rangka pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat), dengan mempertimbangkan baik faktor finansial maupun faktor non finansial sehingga ke depannya dari hasil kebijakan yang dibuat dapat menjadi *pilot project* dan dengan tujuan yang lebih besar adalah terwujudnya APBN yang kuat dan tepat sasaran sesuai dengan visi nawa cita yang saat ini menjadi visi pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam penentuan kebijakan pemenuhan Barang Milik Negara lainnya.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak tertentu. Bagi peneliti, studi ini diharapkan

dapat berguna untuk diterapkan di instansi tempat penulis bekerja, dan dapat memberikan kontribusi nyata mengenai kebijakan pemerintah dibidang pemenuhan kebutuhan BMN khususnya di Kementerian Keuangan. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi Tim Biro Perlengkapan dalam menyusun analisa manfaat pemenuhan kebutuhan Barang Milik Negara khususnya kendaraan dinas operasional jabatan roda 4 (empat), sehingga pengambilan kebijakan pemerintah terkait penggunaan APBN efektif dan efisien. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan akan semakin melengkapi penelitian terdahulu dan sebagai katalis akan adanya penelitian lebih lanjut terkait *benefit and cost* atas penerapan kebijakan sewa/lease dalam pemenuhan kebutuhan barang khususnya dalam sektor publik.

F. Metodologi Penelitian

1. Objek penelitian

Objek penelitian pada skripsi ini adalah pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan terbatas hanya pada kendaraan dinas operasional pejabat eselon I dan II Tahun Anggaran 2016. Penulis akan menghitung dari sisi finansial yaitu *total cost ownership* dan faktor lainnya, untuk selanjutnya dibandingkan apabila pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan mekanisme beli dan sewa.

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama. Data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dan data berupa rincian nilai pagu anggaran sewa, biaya pemeliharaan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan nilai sewa/beli menurut *e-catalog* LKPP dan dari survei lapangan kepada penyedia barang/jasa.

Penelitian ini juga menggunakan studi literatur dan kajian pustaka dalam menganalisis permasalahan. Studi literatur ini didapat dari jurnal ilmiah, buku referensi, maupun *best practice* penerapan alternatif pemenuhan kebutuhan barang melalui mekanisme sewa dan dengan memperhatikan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan barang dengan mekanisme beli yang selama ini dipakai.

3. Teknik pengumpulan data

Langkah yang akan dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah melalui:

a. Penelitian kepustakaan

Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan adalah dengan membaca dan memahami berbagai literatur, buku, artikel, dan peraturan untuk menginventarisasi teori yang relevan dengan materi penulisan skripsi.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung kepada sumber data untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan objek penelitian melalui metode wawancara dan kuesioner. Informasi yang relevan dengan pokok persoalan penelitian dikumpulkan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan melalui kontak langsung dengan tatap muka untuk dijawab oleh narasumber maupun narasumber mengisi kuisisioner. Rencana pengumpulan data wawancara yang dibutuhkan dalam penelitian ini ditujukan kepada pejabat dan pelaksana pada Biro Perlengkapan selaku Pengguna Barang serta pejabat dan pelaksana pada Biro Umum selaku Kuasa Pengguna Barang.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang analisisnya memiliki sifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2014). Metode penelitian kualitatif ini merupakan penelitian dengan model simulasi yang berupa analisis tentang nilai ekonomi dalam proses pembuatan keputusan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Adapun kebijakan yang diambil tersebut berupa pilihan pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional jabatan eselon I dan eselon II.

Peneliti melakukan analisa pelaksanaan model *Life Cycle Costing* di negara yang telah menerapkannya selanjutnya dibandingkan dengan kondisi di Indonesia. Selanjutnya, peneliti merumuskan metode yang paling tepat untuk di terapkan di pemerintahan Indonesia dalam penelitian ini dilakukan di lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan perbandingan manfaat dan biaya yang dihasilkan dari masing-masing alternatif. Dari sisi finansial, penulis akan melakukan dengan menghitung *life cycle costing* dari masing-masing alternatif, sedangkan manfaat dari sisi non finansial, akan dilakukan penelitian dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process*, sehingga akan ditemukan tiap biaya yang dikeluarkan, berapakah manfaat yang diterima. Selanjutnya, akan dilakukan pencarian literatur untuk mendukung teori yang dapat dijadikan dasar penelitian. Proses selanjutnya adalah wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian ini. Data yang berupa angka, baik didapat dari hasil perhitungan maupun hasil kuisioner dalam rangka metode *Analytical Hierarchy Process* akan diolah menggunakan *Microsoft Excel*. Keseluruhan proses penelitian diakhiri dengan perumusan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

5. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini direncanakan akan terdiri dari lima bab, dimana tiap-tiap bab tersebut akan berisi pembahasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, permasalahan dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan garis besar/pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menguraikan tentang teori-teori yang diambil dari literatur-literatur yang dianggap relevan. Dalam bab ini akan membahas teori LCC, konsep penerapan LCC, konsep dan penerapan *Analytical Hierarchy Process*, dan *Benefit and cost Analysis* dalam pengambilan keputusan.

BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, kondisi anggaran di Indonesia, kebutuhan kendaraan dinas di Kementerian Keuangan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN EVALUASI

Bab ini akan membahas mengenai analisa atas alternatif pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas jabatan roda 4 (empat) baik dari faktor finansial dan faktor lainnya.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini, penulis akan mengambil simpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, serta mencoba memberikan saran-saran perbaikan yang dipandang perlu.

